

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisa data, peneliti menarik simpulan sebagai berikut :

1. Konsekuensi hukum atas tanggungjawab Kementerian Komunikasi dan Digital atas perlindungan data pribadi yaitu memiliki tanggung jawab hukum yang signifikan dalam melindungi data pribadi masyarakat, termasuk melalui penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Tanggung jawab ini mencakup pengawasan, evaluasi kepatuhan regulasi, dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Jika Kementerian Komunikasi dan Digital gagal dalam melaksanakan tanggung jawab ini, mereka dapat dikenakan sanksi administrative atau hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta kehilangan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Pelanggaran terhadap data pribadi tidak hanya bagi reputasi pemerintah sebagai pengelola namun juga bagi individu, hal ini menuntut Kementerian Komunikasi dan Digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi.
2. Dampak hukum atas kelalaian Kementerian Komunikasi dan Digital dalam melindungi data pribadi masyarakat khususnya data sensitif seperti paspor, dapat mengakibatkan dampak hukum yang serius. Ini

termasuk potensi pelanggaran hak asasi manusia, kerugian finansial bagi individu yang datanya disalahgunakan, serta kerusakan reputasi bagi institusi pemerintahan. Kelalaian tersebut dapat memicu tuntutan hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan data yang ada, baik konsekuensi maupun dampak hukum menunjukkan pentingnya peran aktif Kementerian Komunikasi dan Digital dalam menjaga keamanan data pribadi masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan individu dan institusi pemerintahan.

B. Saran

Adapun saran untuk meningkatkan perlindungan data pribadi di Indonesia, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi:

1. Agar pemerintah melaksanakan program sosialisasi yang intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi data pribadi mereka. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus diawasi dengan sangat ketat dan membentuk lembaga pengawas yang independen untuk memantau pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
2. Agar pemerintah dan juga lembaga terkait meningkatkan standar keamanan sistem yang mengelola data pribadi, termasuk penggunaan teknologi enkripsi, *firewall*, dan pemantauan aktivitas anomali untuk mendeteksi potensi kebocoran data, perlunya penguatan regulasi dan prosedur keamanan yang lebih ketat dalam pengelolaan

data pribadi. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran, dan mengatur perlindungan data bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Bayu Rianto, 2020, *Dasar-Dasar Pengantar Teknologi Informasi*, CV. Multimedia Edukasi, Tembilahan

Dhoni Martien, 2023, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Mitra Ilmu, Makassar

Efvy Zam, 2011, *Buku Sakti Hacker*, Media Kita, Jakarta.

Erni Widiarti, dkk, 2024, *Buku Ajar Pengantar Sistem Informasi*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi.

Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Gwijangge, 2004, *Peran TIK Dalam Pembangunan Karakter Bangsa*, Pusat Teknologi dan Komunikasi Pendidikan Nasional, Sulawesi Selatan.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

Yosephus Sudiantara, 2021, *Kewargaan Negara Indonesia*, LPPM Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

Tami Rusli, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, Bandar Lampung.

Pendit, 1992, *Pengantar Konsep Informasi, Data dan Pengetahuan*, Kesainc Blanc, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Komunikasi dan Informatika

C. Sumber Lain

Akbari Amarul, dkk, 2021, "Pertanggungjawaban Pidana Kebocoran Data BPJS dalam Perspektif UU ITE", *Jurnal* VOL. 1 No. 2.

Chamidi, 2004, Kaitan antara Data dan Informasi Pendidikan dengan Perencanaan Pendidikan, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*

Deanne Destriani, dkk, "Upaya Pencegahan Kebocoran Data Konsumen Melalui Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi", *Jurnal*.

Felicia Edbert, dkk, 2023, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi pada Perusahaan Pengelola Jasa Keuangan Berbasis IT", *Jurnal* VOL. 6 No. 2

Fikri Irfan, dkk, 2024, "Analisis Dampak Kebocoran Data Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya", *Jurnal* VOL. 2 No. 06

Galang Surya Mahendra, 2024, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Data Pribadi Passportnya Tersebar Akibat Kelalaian Pemerintah", *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* VOL 1 No. 3 hlm.107.

Ghifari Robby, dkk, 2023, "Manfaat Manajemen Keamanan Informasi Terhadap Pengamatan Data Pribadi", *Jurnal* VOL. 9, No. 2

Kadek Rima, dkk, 2023, "Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia", *Jurnal*.

Meyse Stevely Sisilia Wuwungan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Data Pribadi Pengguna Teknologi Informasi Akibat Tindak Pidana Peretasan" *E-Jurnal Unsrat*

Pricillia Alvionita Yusuf, dkk, "Tanggung Jawab Keamanan Data Digital Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik", *E-Jurnal Unsrat*

Rosalinda E. Latumahina, 2014, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya", *Jurnal Gema Aktualita*, Vol. 3, No. 2

- Sahat Maruli Tua Situmehang, 2021, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber" VOL. 27 No. 1, *Jurnal Unpatti*
- Jurnal UINKHAS *Ekonometrika Teknik dan Aplikasi dengan SPSS*, UIN KH Achmad Sidiq, Jember.
- E-Journal UAJY https://e-journal.uajy.ac.id/29771/3/215214335_Bab%202.pdf
- Jurnal UAJY <http://e-journal.uajy.ac.id/>
- Jurnal UNIKOM <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/83/9/.pdf>
- Jurnal UNPAD <http://news.unpad.ac.id/7>
- Jurnal UNPATTI <https://fhukum.unpatti.ac.id/>
- Ady Thea, 2023, Kasus Kebocoran Data Pribadi Berulang, Perlu Segera Bentuk Otoritas Pengawas PDP <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-kebocoran-data-pribadi-berulang--perlu-segera-bentuk-otoritas-pengawas-pdp-lt64a7dd4b04834/>
- Agustinus Mario Damar, 2023, Pakar Ungkap Dampak Dugaan Kebocoran Data Paspor <https://www.liputan6.com/tekno/read/5337929/pakar-ungkap-dampak-dugaan-kebocoran-data-paspor-penyalahgunaan-data-pribadi-jadi-perhatian>
- BBC, 2023, Sebanyak 24 Juta data pemegang paspor Indonesia diduga bocor, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9e7e9grjmko>
- BKPSDM, Sejarah dan Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi <https://bkpsdm.bengkulukota.go.id/sejarah-dan-perkembangan-teknologi-informasi-dan-komunikasi/>
- Chiara Saullo, 2022, *What are the benefits of complying with data privacy laws*, <https://www.enzuzo.com/blog/data-privacy-benefits>
- Devita Savitri, 2022, Pengertian Implikasi dan Perbedaannya dengan Dampak <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6398375/pengertian-implikasi-dan-perbedaannya-dengan-dampak>
- Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, 2023, <https://www.imigrasi.go.id/berita/2023/03/06/ini-perbedaan-visa-dan-paspor-yang-wajib-anda-ketahui>
- Elsa Raminda, *Perubahan Ekonomi Sosial dan Budaya di Indonesia* <https://kumparan.com/elsa-raminda/perubahan-ekonomi-sosial-dan-budaya-di-indonesia-1x3BDF7Wfzm/1>

- Gemawan, 2018, *Paspor, Jenis, dan Kegunaannya*
<https://indonesiabaik.id/infografis/paspor-jenis-dan-kegunaannya>
- Humas Indonesia, 2023, Dugaan Kebocoran Data 34 Juta Paspor WNI,
<https://humasindonesia.id/berita/dugaan-kebocoran-data-34-juta-paspor-wni-kemenkominfo-panggil-ditjen-imigrasi-dan-bssn-1396>
- Husnul Abdi, 2021, Konsekuensi adalah Akibat dari Suatu Perbuatan
<https://www.liputan6.com/hot/read/4767624/konsekuensi-adalah-akibat-dari-suatu-perbuatan-kenali-bedanya-dengan-hukuman>
- JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2022
<https://jdih.maritim.go.id/uu-no-272022-pelindungan-data-pribadi>
- JDIH Kominfo
https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/832/t/undangundang+no+mor+27+tahun+2022
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2022, Belajar Dari Kebocoran Data Krendensial, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14838/Belajar-Dari-Kebocoran-Data-Krendensial-Data-Yang-Paling-Berharga-adalah-Data-Pribadi.html#:~:text=Dari%20beberapa%20literatur%2C%20penulis%20mengelompokkan,manipulasi%20psikologis%20melalui%20social%20engineering.>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/kominfo-telusuri-dugaan-kebocoran-data-paspor-34-juta-wni>
- Komdigi, <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/mengenal-sanksi-pelanggar-data-pribadi>
- Media Justitia, 2023, Data Paspor Diguga Bocor, Siapa Yang Bertanggung Jawab
<https://www.mediajustitia.com/berita/data-paspor-diduga-bocor-siapa-yang-bertanggung-jawab/>
- Merdeka, *Pengertian Globalisasi Teknologi*
<https://www.merdeka.com/jatim/pengertian-globalisasi-teknologi-dan-contohnya-dalam-masyarakat-menarik-diketahui-klm.html?page=3>
- Nafitul Munawaroh, 2024, Tanggung Jawab Pemerintah atas Kebocoran Data Pribadi
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-pemerintah-atas-kebocoran-data-pribadi-lt66881c826cc33/>
- Osman Husain, 2023, *The Benefits of Data Privacy: Why It's Mean To Be Taken Seriously*
<https://www.enzuzo.com/blog/data-privacy-benefits>

Pemerintah Digital, <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/era-baru-perlindungan-data-pribadi>

PPID Lampung, 2023, *Perbedaan Paspor Biasaa dan Paspor Elektronik*
<https://www.imigrasi.go.id/berita/2023/03/06/ini-perbedaan-visa-dan-paspor-yang-wajib-anda-ketahui>

Persepsi Online DEMA Justicia bersama Bhredipta Socarana pada 5 Juni 2020
<https://law.ugm.ac.id/tag/dema-justicia/>

Sivitas, <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/mengenal-sanksi-pelanggar-data-pribadi>

Vida, *Data Pribadi : Defenisi, Jenis, dan Cara Melindunginya*
<https://vida.id/id/blog/data-pribadi>

Vida, *Perlindungan Data Pribadi : Pentingnya UU di Era Digital*,
<https://vida.id/id/blog/perlindungan-data-pribadi>

Widya, 2023, 34 Juta Data Paspor Indonesia Bocor,
<https://widyasecurity.com/2023/07/13/34-juta-data-paspor-indonesia-bocor-bagaimana-kebocoran-terus-terjadi/>

Wikipedia,
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Komunikasi_dan_Digital_Republik_Indonesia

Artikel TELKOM <https://telkomuniversity.ac.id/pengertian-data-fungsi-jenis-jenis-manfaat-dan-contohnya/#:~:text=Arikunto%20Suharsimi%20mendefinisikan%20data%20sebagai,bisa%20berbentuk%20angka%20atau%20simbol>

<https://siplawfirm.id/uu-27-tahun-2022-cara-negara-melindungi-data-pribadi-warga-negaranya/?lang=id>

https://deepublishstore.com/blog/data-sekunder-penelitian/#1_Sugiono